KEMENTERIAN KEUANGAN RI					
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK					

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 6 2 4			H.4 X	H.4 X Final	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	H.2 X Pembetulan Ke-	0 H.3 Pembatala	n	н.5	Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG						
A.1 NPWP : 68 807 611 6722 000						
A.2 NIK :						
A.3 Nama : SUGENG NARPODO						
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG						
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
4 21-402-01	651.700	651.700	0	5	32.585	
Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen O46/SP2D-LS/BLUD-RSJDAHM/IV/2022						
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : C.2 Nama Instansi Pemerintah : C.3 ID Subunit Organisasi : C.4 Tanggal : C.5 Nama Penandatangan : C.6 Pernyataan Wajib Pajak :	2 8 dd 0 4 mm HARI JUMADI Dengan ini saya menyatakan batandatangani secara elektronik.	RAH ATMA HUSADA MAHAK 2 0 2 2 yyyy ahwa bukti Pemotongan/Pemungut	tan Unifikasi telah sa	ya isi dengan	benar dan telah saya	
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.						

Z9E1OQSU